



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022

TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta pembiayaan anggaran termasuk penggunaan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sesuai kesimpulan rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah, dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembahasan laporan realisasi semester I dan prognosis semester II pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan perubahan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
 3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 130 TAHUN 2022
TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran VI, dan Lampiran VII Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	2.045.450.000.000
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	1.049.540.000.000
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	71.650.000.000
1.1.2	Pendapatan PPh Non-Migas	977.890.000.000
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	201.808.239.196
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	36.371.181.698
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	71.116.671.628
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	57.636.618.439
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	12.170.074.740
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	401.012.228.008
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	85.026.360.870
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	112.607.606.310
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	141.019.111
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	731.040.000.000
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	438.791.935.585
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	256.141.436.576
1.2.3	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	19.081.361.622
1.2.4	Pendapatan PPnBM Impor	6.227.840.965
1.2.5	Pendapatan PPN/PPnBM Lainnya	10.797.425.252
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	26.870.000.000
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	4.188.313.910
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	895.422.597
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	5.978.754.967
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	15.300.103.350
1.3.5	Pendapatan PBB Panas Bumi	410.891.995
1.3.6	Pendapatan PBB Lainnya	96.513.181
1.4	Pendapatan Cukai	227.210.000.000
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	218.698.019.607
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	127.411.015



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	8.384.569.378
1.4.4	Pendapatan Cukai Produk Plastik	0
1.4.5	Pendapatan Cukai Minuman Bergula Dalam Kemasan	0
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	10.790.000.000
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	72.898.000.000
2.1	Pendapatan Bea Masuk	53.094.000.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	19.804.000.000
TOTAL		2.118.348.000.000

Memorandum Item:	Jumlah
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	7.887.169.621
a. Komoditas Panas Bumi	2.810.100.000
b. Bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah atau pihak lain yang mendapat penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	5.076.940.000
c. Penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum	129.621

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
42	42 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	515.800.881.485
421	421 PENDAPATAN SUMBER DAYA ALAM	223.312.141.813
4211	4211 Pendapatan Minyak bumi	76.351.120.000
42111	42111 Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000
421111	421111 Pendapatan Minyak Bumi	76.351.120.000
4212	4212 PENDAPATAN GAS BUMI	27.250.340.000
42121	42121 Pendapatan Gas Bumi	27.250.340.000
421211	421211 Pendapatan Gas Alam	27.250.340.000
4213	4213 PENDAPATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	109.974.491.731
42132	42132 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara	683.150.000
421321	421321 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Eksplorasi	35.318.855
421322	421322 Pendapatan Iuran Tetap Pertambangan Mineral dan Batubara - Operasi Produksi	647.831.145
42133	42133 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Mineral dan Batubara	106.319.311.731
421331	421331 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Batubara	84.268.686.478
421332	421332 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Tembaga	4.720.577.441
421333	421333 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Emas	3.795.599.429
421334	421334 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Perak	138.215.105
421335	421335 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Nikel	10.876.465.590
421336	421336 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Timah	1.126.984.704



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
421339	421336 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Pertambangan Lainnya	1.392.782.984
42134	42134 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	2.972.030.000
421341	421341 Pendapatan Bagian Pemerintah dari Keuntungan Bersih Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)	2.972.030.000
4214	4214 Pendapatan Kehutanan	5.681.650.000
42141	42141 Pendapatan Dana Reboisasi	2.293.130.000
421411	421411 Pendapatan Dana Reboisasi	2.293.130.000
42142	42142 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.219.440.000
421421	421421 Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.219.440.000
42143	42143 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	41.480.000
421435	421435 Pendapatan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH)	41.480.000
42144	42144 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.127.600.000
421441	421441 Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan	2.127.600.000
4215	4215 Pendapatan Perikanan	1.628.000.000
42152	42152 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan	56.026.698
421521	421521 Pendapatan Pungutan Pengusahaan Perikanan Bidang Perikanan Tangkap	56.026.698
42153	42153 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.571.973.302
421531	421531 Pendapatan Pungutan Hasil Perikanan	1.571.973.302
4216	4216 PENDAPATAN PANAS BUMI	2.426.540.083
42162	42162 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.292.262.264
421621	421621 Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.292.262.264
42163	42163 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi	34.434.383
421631	421631 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi- Eksplorasi	23.212.812
421632	421632 Pendapatan Iuran Tetap Panas Bumi- Operasi Produksi	11.221.571
42164	42164 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	99.843.436



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
421641	421641 Pendapatan Iuran Produksi/Royalti Panas Bumi	99.843.436
422	422 PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN (KND)	81.535.797.918
4221	4221 Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	81.535.797.918
42213	42213 Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	80.699.547.194
422131	422131 Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	40.839.347.648
422132	422132 Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	39.860.199.546
42214	42214 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	836.250.724
422142	422142 Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	836.250.724
424	424 PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM	79.459.372.889
4241	4241 Pendapatan Jasa Layanan Umum	75.518.532.167
42411	42411 Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat	37.091.994.890
424111	424111 Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	19.974.481.993
424112	424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	13.389.045.267
424113	424113 Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	654.458.027
424115	424115 Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	65.180.609
424116	424116 Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	2.487.050.310
424117	424117 Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	830.905
424118	424118 Pendapatan Penyediaan Barang	2.089.851
424119	424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	518.857.928
42412	42412 Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	2.119.129.971
424121	424121 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.880.232.338



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
424123	424123 Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah	28.310
424129	424129 Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	238.869.323
42413	42413 Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	35.766.541.959
424133	424133 Pendapatan Program Modal Ventura	1.986.157
424134	424134 Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	94.995.336
424135	424135 Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	43.258.807
424136	424136 Pendapatan Investasi	298.180.764
424137	424137 Pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	4.922.840.000
424138	424138 Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	29.896.995.341
424139	424139 Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	508.285.554
42414	42414 Pendapatan dari pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	540.865.347
424141	424141 Pendapatan dari Pengelolaan BMN pada Pengelola Barang	540.865.347
4242	4242 Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	16.600.557
42421	42421 Pendapatan Hibah Terikat - Uang	7.205.978
424215	424215 Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	7.205.978
42422	42422 Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Uang	9.394.578
424221	424221 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Perorangan - Uang	5.893.193
424222	424222 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	2.316.854
424225	424225 Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	1.126.949
424229	424229 Pendapatan Hibah Tidak Terikat -Lainnya -Uang	57.582
4243	4243 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	926.198.979
42431	42431 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	926.198.979
424311	424311 Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	80.312.054
424312	424312 Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	786.746.919



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
424313	424313 Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	59.140.006
4244	4244 Pendapatan dari Alokasi APBN	183.390.625
42442	42442 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat	183.390.625
424421	424421 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	81.697.566
424422	424422 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	101.693.059
4249	4249 Pendapatan BLU Lainnya	2.814.650.563
42491	42491 Pendapatan BLU Lainnya	2.688.963.456
424911	424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	2.495.846.486
424913	424913 Komisi, prongan, dan/atau potongan Bentuk Lian sebagai Akibat dari Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU	3.802.633
424914	424914 Pendapatan Selisih Kurs Realisasi - BLU	697.517
424915	424915 Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Yang Lalu	27.553.055
424916	424916 Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	3.455.448
424917	424917 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR-BLU	44.480
424919	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	157.563.837
42492	42492 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa	123.091.093
424921	424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	15.760.045
424922	424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	33.486.194
424923	424923 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	46.817.574
424924	424924 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	20.900.380
424925	424925 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Aset Tetap Lainnya	4.968.147
424929	424929 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Lainnya	1.158.753



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
42493	42493 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN BLU	2.596.014
424933	424933 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan Peralatan dan Mesin BLU	2.395.542
424939	424939 Pendapatan BLU Lainnya dari Penjualan BMN Lainnya BLU	200.472
425	425 PENDAPATAN PNBP LAINNYA	131.493.568.864
4251	4251 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	46.340.586.459
42511	42511 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang	36.146.266.632
425111	425111 Pendapatan Penjualan Hasil Tambang Batubara	36.099.508.267
425112	425112 Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	42.159.987
425113	425113 Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	-
425114	425114 Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni	-
425119	425119 Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	4.598.378
42512	42512 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	228.076.815
425121	425121 Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	7.774.032
425122	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	141.350.193
425123	425123 Pendapatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	3.443.443
425124	425124 Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	-
425125	425125 Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	-
425129	425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	75.509.147
42513	42513 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	455.313.135
425131	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	362.872.840
425132	425132 Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	3.969.094



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425133	425133 Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.631.185
425134	425134 Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	73.820.351
425135	425135 Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin	-
425137	425137 Pendapatan dari Bangun, Guna, dan Serah (BGS)	2.440.410
425139	425139 Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	10.579.256
42514	42514 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	338.243.520
425141	425141 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	6.688
425142	425142 Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	117.389.786
425143	425143 Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	2.366.044
425145	425145 Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	7.000.000
425149	425149 Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	211.481.003
42515	42515 Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	77.327.888
425151	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	77.327.888
42516	42516 Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	7.813.768.961
425169	425169 Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	819.038.961
425162	425162 Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.994.730.000
42517	42517 Pendapatan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.281.589.507
425171	425171 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM	1.049.646.500
425172	425172 Pendapatan Iuran Badan Usaha dari Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa	231.039.038
425173	425173 Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	903.969
4252	4252 Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	21.269.030.993



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
42521	42521 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum	5.898.213.025
425211	425211 Pendapatan Paspor	1.373.784.950
425212	425212 Pendapatan Visa	2.287.828.192
425213	425213 Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry Permit)	851.314.400
425214	425214 Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	101.075.300
425215	425215 Pendapatan Pelayanan Fidusia	511.439.750
425216	425216 Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	164.658.919
425217	425217 Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	45.631.722
425218	425218 Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	559.923.953
425219	425219 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	2.555.839
42522	42522 Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Luar Negeri	332.733.457
425221	425221 Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	52.849.062
425222	425222 Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri	136.202.445
425223	425223 Pendapatan Dokumen Kekonsuleran	61.878.968
425224	425224 Pendapatan Jasa Pelayanan pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Luar Negeri	49.859.835
425228	425228 Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri	18.530.517
425229	425229 Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	13.412.630
42523	42523 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	239.662.014
425231	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	182.880
425232	425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.829.758
425233	425233 Pendapatan Ongkos Perkara	25.143.588
425234	425234 Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	2.551.500
425235	425235 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	42.270



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425236	425236 Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	48.442.914
425237	425237 Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	51.630.107
425238	425238 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	42.574.828
425239	425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	66.264.169
42524	42524 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang	2.915.332.422
425241	425241 Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	68.961.897
425242	425242 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	77.570.755
425243	425243 Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	237.020.376
425244	425244 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	5.120.959
425245	425245 Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.412.635.292
425246	425246 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	18.358.988
425247	425247 Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	-
425248	425248 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara	76.424.723
425249	425249 Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	19.239.431
42525	42525 Pendapatan Perizinan	1.857.866.888
425251	425251 Pendapatan Perizinan Tenaga Kerja Asing	1.281.546.822
425252	425252 Pendapatan Perizinan Pertanian	18.420.945
425253	425253 Pendapatan Perizinan di Bidang Perdagangan	16.592.912
425254	425254 Pendapatan Perizinan di Bidang Kesehatan	44.406.371



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425255	425255 Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.295.664
425259	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	494.604.174
42526	42526 Pendapatan Pelayanan Kepolisian I	8.327.281.544
425261	425261 Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	448.635.575
425262	425262 Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	703.077.126
425263	425263 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	2.253.297.490
425264	425264 Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	123.442.873
425265	425265 Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	2.548.010.689
425266	425266 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	1.462.683.917
425267	425267 Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	29.148.330
425268	425268 Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	172.016.985
425269	425269 Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	586.968.560
42527	42527 Pendapatan Pelayanan Kepolisian II	1.140.038.286
425271	425271 Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	2.377.489
425272	425272 Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	2.270.717
425273	425273 Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	271.911.551
425274	425274 Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	233.334.003
425275	425275 Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	32.442.645
425276	425276 Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	595.047.000
425279	425279 Pendapatan Pelayanan Kepolisian Lainnya	2.654.881
42528	42528 Pendapatan Akreditasi, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi	557.903.358
425281	425281 Pendapatan Akreditasi	37.890.691



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425282	425282 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Standardisasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	746.891
425283	425283 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	87.000.646
425284	425284 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perdagangan	15.003.604
425285	425285 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Kesehatan	22.696.300
425286	425286 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Pekerjaan Umum	6.236.771
425287	425287 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi di Bidang Perhubungan	95.010.185
425288	425288 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	190.976.500
425289	425289 Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	102.341.770
4253	4253 Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	6.046.323.275
42531	42531 Pendapatan Jasa Kesehatan	2.298.986.064
425311	425311 Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	408.851.380
425312	425312 Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	1.314.837.387
425313	425313 Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	460.293.169
425314	425314 Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	46.226.330
425315	425315 Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	21.836.101
425316	425316 Pendapatan Registrasi Tenaga Kesehatan	46.941.697
42532	42532 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	198.221.990
425321	425321 Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	198.221.990
42533	42533 Pendapatan Jasa Karantina	189.159.077



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425331	425331 Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	187.600.667
425332	425332 Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	1.558.410
42534	42534 Pendapatan Jasa Agraria	2.273.386.303
425341	425341 Pendapatan Pelayanan Pertanahan	2.268.835.403
425342	425342 Pendapatan Penerimaan Hak Atas Tanah P3MB/Presidium Kabinet Dwikora	4.550.900
42535	42535 Pendapatan Jasa Keagamaan	1.086.569.840
425351	425351 Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	1.048.101.800
425359	425359 Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	38.468.040
4254	4254 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	2.705.846.138
42541	42541 Pendapatan Pendidikan	2.109.948.610
425411	425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	37.121.008
425412	425412 Pendapatan Biaya Pendidikan	2.033.340.164
425413	425413 Pendapatan Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Masyarakat	2.373.261
425419	425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya	37.114.177
42542	42542 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia	178.367.550
425421	425421 Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	165.149.807
425429	425429 Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	13.217.742
42543	42543 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek	414.443.597
425431	425431 Pendapatan Layanan Penelitian/Riset dan Pengembangan Iptek	167.017.426
425432	425432 Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	7.979.000
425433	425433 Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	98.734.987
425434	425434 Pendapatan Hasil Penelitian/Riset dan Hasil Pengembangan Iptek	5.209.142
425435	425435 Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	131.806.673
425436	425436 Pendapatan Royalti atas Kekayaan Intelektual	3.345.198
425439	425439 Pendapatan Penelitian/Riset, Survey, Pemetaan, dan Pengembangan Iptek Lainnya	351.171
42545	42545 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan	3.086.381



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425451	425451 Pendapatan Museum	1.250.303
425459	425459 Pendapatan Sejarah dan Kebudayaan Lainnya	1.836.078
4255	4255 Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	26.324.023.870
42551	42551 Pendapatan Jasa Transportasi	5.923.563.697
425511	425511 Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	1.248.543.183
425512	425512 Pendapatan Penggunaan Prasarana Perkeretaapian/Track Access Charge	423.193.536
425513	425513 Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	1.442.238.108
425514	425514 Pendapatan Jasa Navigasi Pelayaran	765.726.170
425515	425515 Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	351.490.493
425516	425516 Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	295.237.373
425517	425517 Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan	510.549.400
425518	425518 Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	719.312.490
425519	425519 Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	167.272.944
42552	42552 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika	20.279.918.362
425521	425521 Pendapatan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	19.064.047.306
425522	425522 Pendapatan Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.159.375.639
425523	425523 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	46.972.738
425524	425524 Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos	560.000
425525	425525 Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Pos Untuk Pembiayaan Layanan Pos Universal	5.073.901
425526	425526 Pendapatan Pengelolaan Nama Domain Indonesia	2.956.903
425529	425529 Pendapatan Jasa Komunikasi dan Informatika Lainnya	931.875
42553	42553 Pendapatan Jasa Lembaga Penyiaran Publik	120.541.811
425531	425531 Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	15.381.991
425533	425533 Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	36.996.786
425534	425534 Pendapatan Jasa Non Siaran LPP TVRI	68.163.034
4256	4256 Pendapatan Jasa Lainnya	845.132.017



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
42561	42561 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	159.537.873
425611	425611 Pendapatan Wisata Alam	124.101.404
425612	425612 Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25.168.748
425619	425619 Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	10.267.721
42562	42562 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	74.443.323
425621	425621 Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	62.431.977
425629	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	12.011.346
42569	42569 Pendapatan Jasa Lainnya	611.150.821
425691	425691 Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	1.889.338
425692	425692 Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	472.693.076
425699	425699 Pendapatan Jasa Lainnya	136.568.408
4257	4257 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	22.165.784.976
42571	42571 Pendapatan Bunga	1.652.360.413
425711	425711 Pendapatan Bunga atas Investasi dalam Obligasi	77
425713	425713 Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.234.415.892
425717	425717 Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan	195.892.654
425719	425719 Pendapatan Bunga Lainnya	222.051.790
42572	42572 Pendapatan Gain on Bond Redemption	-
425721	425721 Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	-
42573	42573 Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	4.024.133.637
425731	425731 Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.486.888.654
425733	425733 Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	537.244.983
42574	42574 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	279.372.587



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425741	425741 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	133.875.835
425742	425742 Pendapatan Selisih Harga SBN	-
425744	425744 Pendapatan Bunga Reverse Repo	14.687.555
425746	425746 Pendapatan Lain-lain atas Rekening Tujuan Tertentu	-
425747	425747 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	130.809.197
42575	42575 Pendapatan dari Selisih Kurs	30.336
425751	425751 Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	-
425752	425752 Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	30.336
42576	42576 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	47.689.726
425761	425761 Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	141
425762	425762 Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	-
425763	425763 Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	35.044.910
425764	425764 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	12.634.905
425765	425765 Pendapatan dari Penutupan Rekening	9.771
42577	42577 Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	15.398.350.654
425772	425772 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	69.804.932
425773	425773 Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury National Pooling	382.190.779
425774	425774 Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	14.454.880.110
425776	425776 Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	491.474.833
42578	42578 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak, Layanan Jasa Lelang, dan Pengurusan Piutang Negara	750.494.800
425781	425781 Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	1.794.800
425782	425782 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	509.000.000



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425783	425783 Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	109.000.000
425784	425784 Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	112.000.000
425785	425785 Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	18.700.000
42579	42579 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	13.352.823
425791	425791 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.345.155
425792	425792 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	698.993
425793	425793 Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	2.308.674
4258	4258 Pendapatan Denda	851.566.867
42581	42581 Pendapatan Denda I	405.144.894
425811	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	347.053.276
425812	425812 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	58.084.554
425813	425813 Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Perdagangan	7.065
425814	425814 Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	-
425815	425815 Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	-
425817	425817 Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	-
425818	425818 Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-
42582	42582 Pendapatan Denda II	337.101.058
425823	425823 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	-
425825	425825 Pendapatan Denda Administrasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	-
425828	425828 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Kompensasi Sewa Beli Rumah Negara Golongan III	148.262



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425829	425829 Pendapatan Denda/Kompensasi di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	336.952.796
42583	42583 Pendapatan Denda III	109.320.915
425839	425839 Pendapatan Denda Lainnya	109.320.915
4259	4259 Pendapatan Lain-lain	4.945.274.270
42591	42591 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	4.639.712.692
425911	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	160.507.460
425912	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	645.975.174
425913	425913 Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	568.832.198
425914	425914 Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang Tahun Anggaran Yang Lalu	610.871
425915	425915 Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	959.288
425916	425916 Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	72.253.629
425917	425917 Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	1.066.023.948
425918	425918 Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	451.437
425919	425919 Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	2.124.098.687
42592	42592 Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	220.991.702
425921	425921 Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	220.991.702
42593	42593 Pendapatan Setoran Sisa Utang dari Pensiunan	9.224.524
425931	425931 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	7.963.344
425932	425932 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Prajurit TNI/PNS Kemhan	828.280
425933	425933 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Anggota Polri/PNS Polri	359.465
425934	425934 Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan Pejabat Negara	73.434
42599	42599 Pendapatan Lain-Lain II	75.345.353



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	ALOKASI 2023
425991	425991 Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	42.916.444
425994	425994 Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari Bank/Pos Persepsi	27.089
425995	425995 Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang Tidak Diambil oleh yang Berhak	-
425997	425997 Pendapatan dari Hibah yang Belum Disahkan	400.000
425998	425998 Pendapatan dari Retur SP2D	1.780.277
425999	425999 Pendapatan Anggaran Lain-lain	30.221.542

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Edia Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: [999]	BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI	: [999.01]	PENGELOLAAN UTANG

--- TETAP---

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	: [999]	BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI	: [999.02]	PENGELOLAAN HIBAH

--- TETAP---



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.07] PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI

--- TETAP---

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01	PELAYANAN UMUM	RM	15.072.054.302	0	0	139.974.880.225	155.046.934.527
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	RM	0	0	5.000.000.000	4.000.000.000	9.000.000.000
04	EKONOMI	RM	0	0	0	155.921.267.098	155.921.267.098
07	KESEHATAN	RM	0	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000
10	PENDIDIKAN	RM	0	0	0	75.577.434.667	75.577.434.667
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	RM	0	0	0	2.750.000.000	2.750.000.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.08] PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA

(dalam ribuan rupiah)

KODE	FUNGSI, SUB FUNGSI, PROGRAM, KEGIATAN	SD	JENIS BELANJA				JUMLAH
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN	
	JUMLAH TOTAL		15.072.054.302	0	5.000.000.000	385.223.581.990	405.295.636.292

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT PADA BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : [999] BENDAHARA UMUM NEGARA
UNIT ORGANISASI : [999.99] PENGELOLAAN TRANSAKSI KHUSUS

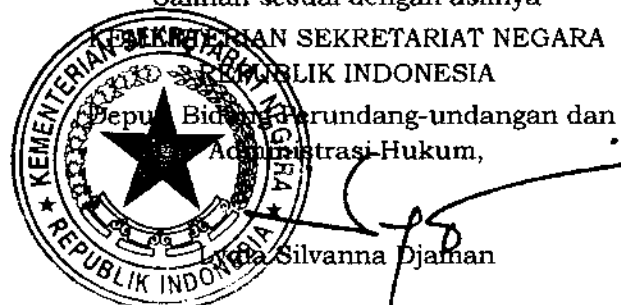
--- TETAP---

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya



SK No 097244 C



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	249.157.344.329
1.1	Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga	173.579.909.662
1.1.1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	80.221.010.125
1.1.2	Kementerian Agama	59.277.363.243
1.1.3	Kementerian Keuangan	3.082.446.724
1.1.4	Kementerian Pertanian	257.806.612
1.1.5	Kementerian Perindustrian	983.591.274
1.1.6	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	119.452.487
1.1.7	Kementerian Perhubungan	2.444.619.746
1.1.8	Kementerian Kesehatan	2.302.739.375
1.1.9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	102.986.839
1.1.10	Kementerian Kelautan dan Perikanan	188.834.940
1.1.11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.319.655.579
1.1.12	Kementerian Pemuda dan Olahraga	710.330.943
1.1.13	Kementerian Pertahanan	2.194.739.747
1.1.14	Kementerian Ketenagakerjaan	2.639.768.000
1.1.15	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	465.087.936
1.1.16	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	117.600.000
1.1.17	Kementerian Komunikasi dan Informatika	164.602.476
1.1.18	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	218.105.516
1.1.19	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.204.541.531
1.1.20	Kementerian Perdagangan	14.607.869
1.1.21	Kepolisian Negara Republik Indonesia	500.000.000
1.1.22	Kementerian Sosial	12.017.218.700
1.1.23	Badan Intelijen Negara	500.000.000
1.1.24	Kejaksaan Republik Indonesia	500.000.000
1.1.25	Badan Riset dan Inovasi Nasional	32.800.000
1.2	Anggaran Pendidikan pada Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	75.577.434.667
2.	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	305.595.143.263
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	174.847.718.165
2.2	Dana Alokasi Khusus	128.668.425.098
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN ANGGARAN PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

NO	KOMPONEN ANGGARAN PENDIDIKAN	JUMLAH
2.2.2	DAK Non Fisik	112.848.125.098
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru ASND	50.450.843.688
2.2.2.2	Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.476.330.539
2.2.2.3	Bantuan Operasional Sekolah	53.569.279.350
2.2.2.4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.047.395.950
2.2.2.5	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.467.218.660
2.2.2.6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000
2.2.2.7	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	1.667.081.911
2.3	Otsus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.079.000.000
3.	Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan	69.500.000.000
3.1	Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	10.000.000.000
3.2	Dana Abadi Penelitian	5.000.000.000
3.3	Dana Abadi Kebudayaan	2.000.000.000
3.4	Dana Abadi Perguruan Tinggi	3.000.000.000
3.5	Pembiayaan Pendidikan	49.500.000.000
	Jumlah	624.252.487.592

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 130 TAHUN 2022 TENTANG RINCIAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
A. Pembiayaan Utang	421.213.499.059
I. Surat Berharga Negara (Neto)	437.834.050.997
II. Pinjaman (Neto)	(16.620.551.938)
1. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	749.450.378
a. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	3.481.576.753
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	(2.732.126.375)
2. Pinjaman Luar Negeri (Neto)	(17.370.002.316)
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	62.056.062.121
i. Pinjaman Tunai	29.500.000.000
ii. Pinjaman Kegiatan	32.556.062.121
- Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat	31.490.814.604
(1) Pinjaman Kegiatan K/L	30.722.095.494
(2) Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan	768.719.110
- Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda	1.065.247.517
b. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri	(79.426.064.437)
B. Pembiayaan Investasi	(175.955.303.621)
I. Klaster Infrastruktur	(85.318.000.000)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Hutama Karya (Persero)	(28.884.000.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.530.000.000)
3. Penyertaan Modal Negara kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	(10.000.000.000)
4. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)	(25.424.000.000)
5. Investasi Pemerintah Nonpermanen untuk Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	(19.480.000.000)
II. Klaster Pendidikan	(20.000.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	(20.000.000.000)



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
a. Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren)	(10.000.000.000)
b. Dana Abadi Penelitian	(5.000.000.000)
c. Dana Abadi Kebudayaan	(2.000.000.000)
d. Dana Abadi Perguruan Tinggi	(3.000.000.000)
III. Klaster Perlindungan Masyarakat	(4.300.000.000)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana	(4.300.000.000)
IV. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(4.789.910.242)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk Dana Reboisasi	(2.225.200.000)
2. Penyertaan Modal Negara kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	(2.564.710.242)
V. Klaster Kerja Sama Internasional	(3.523.940.156)
1. Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI)	(2.000.000.000)
2. Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(266.796.415)
3. Investasi kepada International Finance Corporation (IFC)	(336.069.015)
4. Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(44.250.000)
5. Investasi kepada International Development Association (IDA)	(256.172.500)
6. Investasi kepada International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	(487.902.226)
7. Investasi kepada Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	(132.750.000)
VI. Klaster Lainnya	(58.023.453.223)
1. Penyertaan Modal Negara kepada PT Len Industri (Persero)	(2.210.253.223)
2. Penyertaan Modal Negara kepada Perum LPPNPI/Airnav Indonesia	(659.190.000)
3. Cadangan Pembiayaan Investasi	(5.654.010.000)
4. Pembiayaan Pendidikan	(49.500.000.000)
C. Pemberian Pinjaman	5.284.746.297
I. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah	5.284.746.297
1. Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah (Bruto)	(1.065.247.517)
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pinjaman dari Badan Usaha Milik Negara/Pemerintah Daerah	6.349.993.814



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RINCIAN PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Jumlah
D. Kewajiban Penjaminan	(330.511.505)
I. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(296.151.505)
1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara	(7.702.826)
2. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(159.828.050)
3. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(6.744.701)
4. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	(96.767.407)
5. Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan <i>Light Rail Transit</i> /LRT Jabodebek	(18.727.251)
6. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(6.381.270)
II. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	(34.360.000)
E. Pembiayaan Lainnya	229.715.032.741
I. Saldo Anggaran Lebih	226.880.171.913
II. Hasil Pengelolaan Aset	609.660.828
III. Rekening Pembangunan Hutan	2.225.200.000
JUMLAH	479.927.462.971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,


Silvanra Djaman